

ASBTRAK

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian immateriil berupatekanan psikologis dan pengucilan dari masyarakat. Penegakan hukum menjadi penting untuk melindungi korban. KUHAP sebagai peraturan mengenai proses berjalannya peradilan harus memperhatikan hak-hak korban.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melihat pada norma yang berlaku saat ini dan beberapa putusan pengadilan dengan memfokuskan pada korban pornografi balas dendam. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu dengan mencari peraturan-peraturan yang tertulis, penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Hasil penelitian ini mengenai pornografi balas dendam, kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi peneliti sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban pornografi balas dendammembutuhkan perlindungan karena: 1)harkat dan martabat korban telah direndahkan. 2) korban mengalami tekanan psikologisberupa rasa malu. 3) cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. 4) kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi. 5) UU ITE dan UU Pornografi dapat menjerat pelaku.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian terhadap korban untuk pemberian restitusi, kompensasi, konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi saat dilangsungkannya perkara di pengadilan.

Kata Kunci: Pornografi balas dendam, Pertanggung jawaban, Pornografi

ABSTRACT

Revenge pornography is a form of coercion, threats against someone, generally a woman, to spread pornographic content in the form of photos or videos. The perpetrator could be his girlfriend, an ex-girlfriend who wants to get back, or an unidentified person. As a result of these actions, the victim suffers from immaterial losses in the form of psychological pressure and exclusion from society.

Law enforcement is important to protect victims. KUHAP as a regulation regarding the judicial process must pay attention to the rights of victims. This study uses normative legal research, by looking at the current norms and several court decisions by focusing on victims of revenge pornography.

Research data is collected by means of a literature study, namely by looking for written rules, explanations and theories from books, journals or literature related to the topics, titles, and issues raised in the research, as well as the results of research regarding revenge pornography, then the data obtained will be explained in the form of information and explanations which will then be studied based on the opinions of experts, relevant theories and the researchers' own arguments.

The results of this study indicate that victims of revenge pornography need protection because: 1) the dignity of the victim has been degraded. 2) the victim experiences psychological pressure in the form of shame. 3) the method used by the perpetrators to use internet media so that the digital traces of the immoral content cannot be deleted, and can be accessed and reproduced by anyone. 4) the victim's loss is an immaterial loss, so that providing protection for the victim is important, such as getting compensation, restitution, compensation, medical assistance, counseling, legal assistance, and providing information. 5) UU ITE and UU Pornography can ensnare perpetrators.

This study recommends the need for attention to victims for the provision of restitution, compensation, counseling, legal assistance, and providing information when the case is being held in court.

Keywords: Revenge porn, Liability, Pornography